SABTU, 30 JULI 2016 / NO. 12843 / TAHUN KE-47

EDITORIAL

Mempertimbangkan Hukuman Mati

HUKUMAN mati dinilai tidak memiliki efek jera serta gagal menurunkan angka kejahatan. Mereka yang dihukum mati sebagian besar dinilai merupakan kalangan marginal dan tidak memiliki akses pelayanan hukum.

Hukuman mati juga dipersepsikan tidak dapat dibenarkan secara moral, bahkan melanggar hak asasi manusia (HAM). Apalagi, dasar dari hukuman mati tersebut sekadar pembalasan dendam atau anggapan bahwa hukuman harus setimpal dengan kejahatan pelakunya.

Eksekusi terhadap 4 dari 14 terpidana mati kemarin dini hari dilakukan di tengah kritik dan penolakan yang mengemukakan argumen dengan semangat semacam itu.

Bukan hanya keluarga terpidana mati dan para aktivis HAM, tokoh masyarakat pun ikut angkat suara menolak eksekusi dan meminta hukuman mati tidak dilanjutkan.

Tidak kurang dari Presiden ke-3 RI BJ Habibie pun secara khusus menulis surat kepada Presiden Joko Widodo, yang meminta Jokowi mempertimbangkan kembali penetapan kebijakan moratorium hukuman mati.

Dalam surat itu, Habibie mengemukakan bahwa lebih dari 140 negara di dunia telah menetapkan kebijakan moratorium dan/atau menghapuskan hukuman mati. Ia memahami tantangan yang sangat besar dalam memerangi narkoba. Namun, ia menilai sangat mungkin memerangi narkoba tanpa penetapan hukuman mati, seperti yang telah dilakukan sejumlah negara.

Di tengah tekanan dan penolakan dari berbagai kalangan tersebut, Kejaksaan Agung tetap menjalankan eksekusi terhadap Freddy Budiman, Gajetan Acena Seck Osmane, Michael Titus Igweh, dan Humprey Ejike di LP Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Jaksa Agung M Prasetyo menilai kritik atas pelaksanaan eksekusi mati yang telah dilaksanakan dua kali di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla merupakan hal biasa.

Kita mendukung sepenuhnya keputusan pemerintah untuk tetap menjalankan eksekusi mati tersebut. Kita bukannya tidak memahami dan berempati terhadap pertimbangan dan alasan yang melatari penolakan terhadap hukuman mati. Akan tetapi, harus kita ingatkan dan tekankan kembali bahwa hukuman mati masih menjadi hukum positif di negeri ini.

Artinya, selama eksekusi mati masih tercantum dalam hukum positif kita, sejauh itu pula ia wajib dilaksanakan bila proses peradilan menghendakinya. Tidak melaksanakan hukuman mati sama artinya tidak menjalankan aturan hukum yang berlaku. Itu jelas merupakan pelanggaran hukum dalam bentuk lain.

Peniadaan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan yang memenuhi kriteria bagi pelaksanaan hukuman itu harus terlebih dahulu dilakukan dengan meniadakan hukuman mati pada sistem hukum politik kita. Itu artinya harus ada revisi terhadap UU yang mengatur hukuman tersebut.

Di lain sisi, kita juga perlu mencermati perkembangan penghapusan hukuman mati setelah 140 dari total 205 negara di dunia telah menetapkan kebijakan moratorium dan/atau menghapuskan hukuman mati.

Dengan melihat kecenderungan itu, di masa depan sudah sepatutnya kita juga mempertimbangkan kembali hukuman mati dalam sistem hukum kita. Apalagi jika kelak penghapusan hukuman mati dijadikan sebagai salah satu kriteria untuk mengukur tingkat peradaban negara.

Jangan pula karena terus memberlakukan hukuman mati, Indonesia kelak dicap sebagai negara barbar.

Jangan pula karena terus memberlakukan hukuman mati, Indonesia kelak dicap sebagai negara barbar.

Silakan tanggapi
Editorial ini melalui:
www.mediaindonesia.com
www.metrotvnews.com

EDITORIAL

Pelajaran dari Pengakuan Freddy

KETERLIBATAN aparat dalam bisnis peredaran narkoba mungkin bukan cerita baru. Bukan sekali-dua kali kita mendengar ada polisi atau tentara tertangkap sedang berpesta narkoba atau menjadi kaki tangan jejaring bisnis terlarang itu.

Namun, yang kali ini jelas sangat berbeda. Pengakuan terpidana mati Freddy Budiman melalui tulisan Haris Azhar di media sosial yang menyebut ada aliran uang hingga Rp450 miliar kepada BNN dan Rp90 miliar kepada pejabat tertentu di Polri, juga ke pejabat di Bea dan Cukai, jelas tak bisa dianggap sepele.

Pertama, uang upeti yang disebut dalam pengakuan itu jumlahnya terbilang besar, ratusan miliar rupiah. Kedua, dalam pengakuan yang menjadi *viral* di media sosial itu bukan lagi menyinggung keterlibatan individual, melainkan keterlibatan institusi yang mestinya justru bertugas memberantas narkoba.

Problemnya, saksi kunci yakni Freddy Budiman, orang yang memberi pengakuan itu, sudah dieksekusi mati, pekan lalu. Sudah tentu itu akan menyulitkan kepolisian mengusut kebenaran informasi menghebohkan tersebut. Perlu kerja ekstra keras dan kemauan tinggi dari penegak hukum bila ingin membuat kasus ini menjadi terang benderang.

Namun, sesulit apa pun itu, kepolisian tak boleh menggunakannya sebagai alasan untuk tidak menindaklanjuti kasus tersebut. Bagaimanapun bola panas sudah dilemparkan Fredy melalui tulisan Haris Azhar. Agar isu tersebut

Perang terhadap narkoba tampaknya belum menjadi darah dan daging, masih sebatas slogan, sekadar perang-perangan.

Silakan tanggapi Editorial ini melalui:
www.mediaindonesia.com
www.metrotvnews.com

tidak berkembang menjadi fitnah, polisi wajib menyelidikinya.

Yang mesti dikawal publik, jangan sampai polisi menggunakan alasan 'sulit menggali keterangan saksi' itu sebagai dalih untuk menutupi keengganan mereka mengusut kasus yang melibatkan anggota sendiri.

Dari sisi yang berbeda, kasus itu juga menguakkan fakta bahwa pemberantasan narkoba di negeri ini masih amburadul. Perang terhadap narkoba tampaknya belum menjadi darah dan daging, masih sebatas slogan, sekadar perang-perangan. Bila aparat dan institusi yang seharusnya berperan penting dalam menumpas penggunaan dan peredaran narkoba saja terlibat, bagaimana barang haram itu bisa diberantas?

Jika Indonesia tak ingin menjadi surga bagi para pengedar dan pemakai narkoba, harus ada pembenahan dalam pelaksanaan pemberantasan narkoba mulai sekarang dan untuk masa mendatang. Perang melawan narkoba harus dilakukan dengan sangat serius karena grafik pengguna narkoba di negeri ini terus meningkat.

Dalam perspektif itu, pengakuan Freddy tidak ada salahnya dijadikan bahan introspeksi sekaligus titik awal bagi semua yang terlibat dalam gerakan pemberantasan narkoba untuk mereformasi diri. Benar atau tidaknya informasi yang disampaikan, biarkan hukum yang nanti menentukan. Akan tetapi, bukan berarti pengakuan tersebut lantas boleh dianggap tak penting sebagai pijakan untuk pembenahan sistem.

Pelajaran selanjutnya yang bisa dipetik ialah bahwa hukuman mati punya ekses negatif. Seperti pada kasus ini, negara sulit untuk mendapatkan kesaksian penting dari terpidana karena terpidana itu sudah dieksekusi mati. Sama juga ketika negara harus menanggung dosa tak terampuni karena salah menghukum orang, sementara orang itu sudah dieksekusi.

Inilah salah satu alasan mengapa hukuman mati patut dipertimbangkan kembali dalam sistem hukum kita. Jika memang ekses negatif hukuman mati lebih banyak ketimbang kemampuannya memberi efek jera, tidak elok pula jika kita berlama-lama mempertahankannya.

KAMIS, 4 AGUSTUS 2016 / NO. 12848 / TAHUN KE-47

EDITORIAL

Sesat Penanganan Testimoni Freddy

UNTUK memerangi narkoba yang kian menggila, katanya penegak hukum membutuhkan kerja sama dan kontribusi dari seluruh anak bangsa. Katanya aparat butuh dukungan. Akan tetapi, ketika ada yang memberikan dukungan, mereka justru menganggapnya sebagai lawan.

Mustahil disangkal, narkoba telah menegaskan diri sebagai salah satu musuh terganas, predator paling kejam yang mengancam masa depan bangsa. Ia termasuk kejahatan luar biasa karena daya rusaknya luar biasa, sepak terjangnya luar biasa, cengkeramannya pun sudah luar biasa.

Pada konteks itu, menjadi sebuah keharusan seluruh elemen bangsa berpadu melawan narkoba. Wajar jika penegak hukum berharap peran serta seluruh rakyat karena mereka memang mustahil bertarung sendirian. Namun, bagaimana mungkin masyarakat mau berperan jika orang yang berkontribusi malah disambut dengan semangat permusuhan?

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar ialah contoh konkret paradoks itu. Oleh TNI, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Polri, Haris dilaporkan ke Bareskrim Polri. Ia dituding mencemarkan nama baik ketiga institusi tersebut karena menulis testimoni gembong narkoba yang sudah dieksekusi mati, Freddy Budiman, soal perilaku busuk aparat.

Testimoni Freddy seperti ditulis Haris memang mengerikan. Ia, misalnya, menyebut menggelontorkan uang total Rp450 miliar ke aparat BNN dan Rp90 miliar ke personel Polri agar bisnis terkutuknya tak diganggu. Ia juga mengaku pernah didampingi jenderal TNI berbintang dua saat membawa narkoba lewat darat dari Medan ke Jakarta.

Betul bahwa testimoni Freddy yang ditulis Haris itu sangat dangkal tanpa disertai bukti awal. Tak salah jika ada yang mempersoalkan kenapa Haris baru membeberkannya lewat media sosial menjelang eksekusi Freddy. Padahal, pengakuan itu didapat dua

> Kita khawatir pelaporan terhadap Haris ujung-ujungnya menghadirkan ketakutan bagi masyarakat yang hendak berkontribusi memerangi narkoba.

Silakan tanggapi Editorial ini melalui:
www. mediaindonesia.com
www.metrotvnews.com

tahun silam.

Namun, tak salah pula jika publik mempertanyakan kenapa TNI, BNN, dan Polri begitu defensif dan begitu cepat membawa persoalan Haris ke jalur hukum. Haris menyebarkan testimoni Freddy belum genap seminggu, juga belum terlihat ada tindakan serius untuk menindaklanjuti pengakuan itu. Akan tetapi, mereka menggebu melaporkan Haris.

Lebih aneh lagi, Kepala BNN Komjen Budi Waseso di depan pewarta mengalirkan ucapan terima kasih kepada Haris, tetapi BNN juga melaporkannya ke Bareskrim. Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun buru-buru menyimpulkan bahwa pengakuan Freddy yang ditulis Haris sulit dibuktikan.

Pengakuan Freddy memang miskin bukti. Namun, sedangkal apa pun informasi itu, seminim apa pun bukti yang menyertai, aparat harus serius menindaklanjuti. Sangat tidak patut jika resistensi yang justru dikedepankan hanya karena testimoni Freddy menelanjangi personel mereka.

Kenapa penjahat narkoba kian mengganas meski beragam upaya telah dilakukan untuk memberantasnya? Salah satunya karena masih banyak aparat yang bertabiat pagar makan tanaman. Aparat yang semestinya memberangus malah ikut berkomplot menyuburkan peredaran narkoba.

Pengakuan Freddy yang ditulis Haris semestinya menjadi *entry point* bagi TNI, Polri, dan BNN untuk membersihkan institusi mereka dari antek-antek bandar narkoba. Tak elok institusi-institusi penegak hukum itu malah bersikap intimidatif dengan melaporkan Haris. Kita khawatir pelaporan terhadap Haris ujung-ujungnya menghadirkan ketakutan bagi masyarakat yang hendak berkontribusi memerangi narkoba, terlebih bila kejahatan luar biasa itu melibatkan aparat.

EDITORIAL

Membangun Optimisme Pemberantasan Narkoba

PESIMISME adalah sebuah hal lumrah dalam perang. Namun, pesimisme yang dibiarkan lama akan menjadi kekalahan yang datang lebih cepat. Pertaruhan untuk membalik pesimisme inilah yang ada dalam perang melawan narkoba di Indonesia sekarang.

Telah lama publik dibuat pesimistis karena pemerintah lemah melawan muslihat para gembong narkoba. Segala hal yang mustahil bisa mereka buat, termasuk menjadikan penjara sebagai markas besar peredaran barang haram tersebut.

Pekan lalu, pesimisme makin menjadi ketika pengakuan tentang para antek narkoba justru dibalas dengan kriminalisasi. Langkah itulah yang dilakukan Polri, TNI, dan BNN terhadap Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar. Haris membuka pengakuan gembong narkoba Freddy Budiman tentang aliran uang hingga Rp450 miliar kepada orang-orang di institusi penegak hukum.

Beruntung, sisa-sisa kepercayaan masih bisa kita pegang setelah BNN akhirnya mengikuti arahan Presiden Jokowi untuk mengusut tuntas pengakuan Haris dan menindak semua aparat yang terlibat. Kepala BNN Budi Waseso mengungkapkan, meski menuntut kebenaran informasi Haris, pihaknya juga tetap membentuk tim penyelidik. Ia bahkan juga memberi jaminan perlindungan kepada Haris jika mau mengungkapkan petugas BNN yang terlibat dalam peredaran narkoba.

> Pembentukan tim independen akan menambah optimisme publik bahwa pemberantasan narkoba, apalagi yang melibatkan aparat, bakal sukses.

Silakan tanggapi Editorial ini melalui:
www.mediaindonesia.com
www.metrotvnews.com

Langkah Budi Waseso pantas diapresiasi dan semestinya menjadi contoh bagi TNI dan Polri. Hanya dengan membuka diri, mereka bisa memberikan pembelaan dan pembuktian paling kuat kepada masyarakat.

Terlebih, mantan Kepala LP Nusakambangan Liberty Sitinjak pun telah mengakui adanya tawaran uang Rp10 miliar dari Freddy untuk memuluskan bisnis dari penjara. Sikap defensif terhadap informasi Haris justru hanya menciptakan bumerang. Ke-

tiga institusi penegak hukum itu menempatkan diri mereka sendiri untuk semakin dicurigai.

Namun, respons positif BNN tidak boleh memuaskan Presiden Jokowi. Dengan jumlah uang kotor yang begitu besar, pengungkapan kasus itu dengan sendirinya juga merupakan pertaruhan bagi Presiden. Sungguh naif jika kita berpikir bahwa para aparat antek narkoba yang terbiasa disuap ratusan miliar rupiah hanya menjual kehormatan kepada Freddy. Teramat mungkin, aparat-aparat itu kembali mengkhianati negara, dan berarti pula menjadi musuh dalam selimut bagi Presiden.

Oleh karena itu, sudah seharusnya Presiden membentuk tim independen yang langsung berada dalam komandonya. Pembentukan tim independen akan menambah optimisme publik bahwa pemberantasan narkoba, apalagi yang melibatkan aparat, bakal sukses.

Oleh karena itu, sudah seharusnya Presiden membentuk tim independen yang langsung berada dalam komandonya. Pembentukan tim independen akan menambah optimisme publik bahwa pemberantasan narkoba, apalagi yang melibatkan aparat, bakal sukses.

Tidak hanya itu, negara juga harus responsif terhadap laporan masyarakat soal praktik busuk yang dilakukan aparat terkait dengan peredaran narkoba. Laporan itu diberikan masyarakat kepada Kontras.

Institusi-institusi penegak hukum semestinya menjadi pihak yang paling berkepentingan menindaklanjuti laporan-laporan itu. Laporan yang dibiarkan berkembang tanpa pengusutan justru akan menjadi fitnah bagi Polri ataupun BNN.

JUMAT, 16 SEPTEMBER 2016 / NO. 12889 / TAHUN KE-47

EDITORIAL

Menyikapi Temuan TPF Kasus Freddy

DUGAAN keterlibatan aparat Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan TNI dalam kasus narkoba Freddy Budiman yang berkembang tidak lama setelah bandar narkoba itu dieksekusi berakhir sudah. Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Freddy Budiman, kemarin, merilis hasil investigasi yang secara umum menyatakan ocehan bandar narkoba yang dieksekusi pada 29 Juli 2016 itu tidak terbukti.

TPF Kasus Freddy menyatakan tidak menemukan fakta yang mendukung testimoni Freddy Budiman, seperti yang dirilis Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar di media sosial dalam artikel berjudul *Cerita Busuk dari Seorang Bandit*.

Dalam testimoninya kepada Haris, Freddy menyebut ada aparat BNN dan Polri yang ikut terlibat dalam kejahatan. Freddy, antara lain, mengaku menyetor uang Rp450 miliar ke aparat BNN dan Rp90 miliar ke pejabat Polri.

Sebulan setelah melakukan investigasi, TPF kasus Freddy ternyata tidak menemukan fakta tersebut. Akan tetapi, dugaan keterlibatan aparat bukannya sama sekali tidak terbukti. Dalam investigasi, TPF menemukan petunjuk akan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan perwira menengah berinisial KPS. KPS dilaporkan telah melakukan pemerasan sebesar Rp668 juta terhadap tersangka bernama Akiong.

Akiong alias Chandra Halim disebut-sebut merupakan gembong narkoba yang kelasnya lebih tinggi daripada Freddy. Dari Akiong itulah Freddy diduga mendapatkan dana untuk menjalankan operasi perdagangan narkoba. Akiong sudah divonis mati, tetapi belum dieksekusi.

Kita menghormati hasil kerja TPF dalam kasus Freddy. Hasil investigasi TPF setidaknya telah memperkuat dugaan keterlibatan aparat. Dalam kaitan itu, sudah sepatutnya seluruh pihak menerima hasil investigasi tim yang anggotanya tidak hanya berasal dari

Lebih penting lagi aparat membersihkan anggota mereka yang terlibat peredaran gelap narkoba. Bukankah kita tidak mungkin membersihkan lantai dengan sapu kotor?

Silakan tanggapi Editorial ini melalui:
www.mediaindonesia.com
www.metrotvnews.com

Polri, tetapi juga dari berbagai unsur masyarakat.

Namun, kita mendesak agar temuan investigasi TPF tersebut ditindaklanjuti dengan proses hukum tanpa pandang bulu. Meski dugaan keterlibatan aparat seperti testimoni Freddy tidak didukung fakta, bukan berarti kita boleh membiarkan jika ada petunjuk lain mengenai dugaan keterlibatan aparat, betapa pun kecilnya petunjuk itu.

Aparat harus memeriksa Akiong. Bukan tidak mungkin dari Akiong penegak hukum mendapat petunjuk lebih hebat lagi tentang keterlibatan aparat lain dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Untuk itu, kita juga mendesak pemeriksaan terhadap Akiong berlangsung transparan.

Di sisi lain, Polri dan lembaga penegak hukum lainnya juga tidak perlu bersikap reaktif, apalagi defensif. Polri akan lebih bijak jika menanggapi pengungkapan testimoni Freddy oleh Haris Azhar sebagai bahan introspeksi dan masukan bagi lembaga itu untuk memperbaiki kinerja. Tidak bijak bila Polri, BNN, atau TNI memerkarakan Haris Azhar secara pidana.

Aparat semestinya menjadikan apa yang dilakukan Haris sebagai bentuk peran aktif masyarakat dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Sikap positif semacam itu jauh lebih produktif untuk memenangi perang melawan narkoba.

Perang melawan narkoba sebagai kejahatan luar biasa haruslah dilakukan dengan cara-cara luar biasa pula. Partisipasi masyarakat, sebagaimana yang dilakukan Haris, amat berharga dalam memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Bila aparat memerkarakan Haris, bukan tidak mungkin masyarakat menjadi enggan melaporkan kejahatan narkoba yang diketahui mereka kepada aparat.

Namun, lebih penting lagi aparat membersihkan anggota mereka yang terlibat peredaran gelap narkoba. Bukankah kita tidak mungkin membersihkan lantai dengan sapu kotor?